

Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Antara Pemerintah Daerah dan PT. Energi Bayu Dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Jenepoto

Firdha Alifiah^{1*}, Muhammadiyah², Budi Setiawati³

- 1) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 2) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 3) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to determine the implementation of the coordination function in prevention between the Regional Government and PT. Bayu Energy Development of Bayu Power Plant (PLTB) in Jeneponto Regency. This study was a qualitative descriptive study, while data collection techniques used observation, interviews and documentation. While the informants in this study were 8 people. Data sources used were primary data and secondary data, data analysis techniques with data reduction, data presentation and verification. The results showed that the Implementation of the Coordination Function between the PUPR Office and PT. Bayu Energy in PLTB Development in Jeneponto Regency had not run optimally, seen from the aspect of conflict prevention and contradiction, it did not find any solutions in its settlement, because the coordination requested by the PUPR Office was not responded by PT. EBJ, aspects of prevention of wastefulness prevention of wastefulness that occurred between the two parties each opinions on the SOP that governed it, the aspect of preventing differences in approach did not work optimally because it had a different approach, and the prevention of differences in implementation did not run well because there was no division of labor.

Keywords: *coordination function, jeneponto pltb development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pencegahan antara Pemerintah Daerah dan PT. Energi Bayu Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Koordinasi antara Dinas PUPR dengan PT. Energi Bayu dalam Pembangunan PLTB di Kabupaten Jeneponto belum berjalan dengan optimal dilihat dari aspek Pencegahan konflik dan kontradiksi tidak menemukan titik terang dalam penyelesaiannya, dikarenakan koordinasi yang diminta oleh Dinas PUPR tidak direspon oleh PT. EBJ, aspek pencegahan pemborosan pencegahan pemborosan yang terjadi antara kedua pihak masing-masing berpendirian pada SOP yang mengaturnya, aspek pencegahan perbedaan pendekatan tidak berjalan dengan maksimal karena memiliki perbedaan pendekatan, dan pencegahan perbedaan pelaksanaan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya pembagian kerja.

Kata Kunci: *fungsi koordinasi, pembangunan pltb jeneponto*

* firda@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan yang ditargetkan akan berjalan di akhir tahun 2018 akhirnya dioperasikan pada awal tahun 2019. Dalam pembangunan PLTB di Kabupaten Jeneponto mengalami berbagai masalah, salah satunya adalah rusaknya jalan sepanjang 30 km yang disebabkan oleh aktivitas truk pengangkut muatan. Truk yang digunakan tersebut mengangkut beban muatan yang over kapasitas sehingga merusak jalan yang dilewati oleh truk saat mengangkut material. Hal ini mengecewakan masyarakat setempat, dikarenakan jalan yang biasa mereka lewati rusak, sedangkan jalan tersebut belum lama mereka nikmati. Namun sampai saat ini belum juga ditindak lanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum karena menganggap itu adalah kesalahan dari pihak PT. Energi Bayu sehingga PT. Energi Bayu yang seharusnya memperbaiki jalan yang rusak tersebut karena Dinas PU sendiri baru saja memperbaikinya di tahun 2015,2016,2017 dan rusak ditahun 2018 Sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik untuk memecahkan masalah tersebut. Dikutip dari Tribun Jeneponto tepatnya.

Koordinasi ini sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu program atau kegiatan, dimana salah satu program yang besar akan membutuhkan koordinasi yang efektif, seperti halnya pembangunan PLTB di Kabupaten Jeneponto. Untuk mencapai koodinasi yang efektif tersebut dibutuhkan komunikasi yang baik antar instansi yang terkait agar memudahkan pelaksanaan koordinasi. Tidak hanya itu, beberapa instansi tersebut harus melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya yakni tidak menyimpang dari perencanaan awal maupun kesepakatan awal, sehingga dapat mengurangi resiko yang akan timbul seperti halnya kerusakan pada fasilitas publik, yakni infrastruktur jalan. Koordinasi antar instansi harus optimal agar tidak terjadi kesalahan ataupun hal yang lainnya, dengan begitu tidak ada satupun pihak yang akan merasa terganggu atau merasa dirugikan dengan adanya ide pembangunan PLTB di Kabupaten Jeneponto.

Selanjutnya pembangunan PLTB ini penting untuk menunjang ketersediaan listrik selain itu dengan memanfaatkan potensi angin dapat mengurangi pencemaran udara dikarenakan tidak menggunakan bahan bakar dan tidak ada pencemaran gas sehingga dapat mengurangi polusi.

Keuntungan lain yaitu listrik yang dihasilkan tidak mengandung emisi, dimana emisi yang bisa menyebabkan hujan asam ataupun gas rumah kaca. Selanjutnya PLTB merupakan sumber energi terbarukan, dimana energi angin tidak akan pernah habis.

Kabupaten Jeneponto merupakan daerah yang sangat cocok untuk pembangunan PLTB dikarenakan kondisi iklim yang mendukung dimana Jeneponto memiliki potensi angin yang cukup besar. Sehingga dengan adanya PLTB akan sangat membantu memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Jeneponto (Sulawesi Selatan). Pembangunan PLTB yang rumit membutuhkan manajemen yang baik dan tepat dan diperlukan koordinasi yang baik antar instansi yang terkait dengan pembangunan PLTB tersebut.

Pembangunan PLTB merupakan sebuah proyek pembangunan tenaga kelistrikan yang besar dan kompleks serta melibatkan banyak *stakeholder*. Sehingga koordinasi diantara *stakeholder* tersebut merupakan suatu keniscayaan. Koordinasi tersebut dimaksudkan agar para *stakeholder* terjalin sinergitas yang kuat, terstruktur massif dan sistematis.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah telah dijelaskan hubungan

dalam berkoordinasi antar lembaga pemerintahan, tepatnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI tentang pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan No.08 Tahun 2017. Kebutuhan akan koordinasi tidak bisa dipungkiri, karena dalam melakukan kegiatan yang efektif dan efisien dibutuhkan koordinasi yang baik, hal ini didukung pula oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto No. 02 Tahun 2008 Bab I dimana didalamnya berisi tentang tugas dan fungsi masing-masing pegawai maupun lembaga pemerintah. Sehingga dengan adanya struktur dan pembagian kerja tersebut akan memudahkan serta memperjelas koordinasi yang akan terbangun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pembangunan serta penyediaan pembangkit listrik sangat dibutuhkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat serta aktivitas masyarakat, sehingga dalam hal ini sesuai dengan UU Tentang Ketenagalistrikan Bab 1 Pasal 1, sangat jelas bahwa pengadaan pembangkit listrik sangatlah penting. Terlepas dari UU tersebut terdapat pula pada peraturan pemerintah tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik

tepatnya No.14 tahun 2012 Bab 1 Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan usaha penyediaan tenaga listrik dimana usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. Perlu dipahami distribusi tenaga listrik adalah penyaluran listrik oleh sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Koordinasi lahir dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Sebagaimana koordinasi diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh beberapa individu yang sederajat yang saling menukar informasi dan menata (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290). Adapun menurut Newman dalam Herispon (2018:52) bahwa koordinasi berasal dari kata bahasa Inggris *coordination* yang artinya being *co-ordinate*, dimana terdapat koordinat yang serentak didua garis dalam bidang datar, yang dapat pula diartikan bahwa dua garis yang berpotongan pada koordinat tertentu. Didalam administrasi, koordinasi disangkutpautkan pula dengan penyerasian serta penyatuan tindakan dari sekelompok orang.

Melalui pengkajian beberapa literature pada dasarnya proses koordinasi mempunyai unsur-unsur penting dalam pelaksanaannya, yang meliputi antara lain kesatuan tindakan, komunikasi, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi, *continuity*, *direct contac*, *reciprocal relation*, *mutual respect*, *clarity of objective*, *scalar chain*, mekanisme, pebagian peran dan kerja, disiplin. Koordinasi dibangun dari unsur-unsur ini. Kita dapat mengoptimalkan koordinasi dengan melakukan perbaikan dan sentuhan padanya. Adapun prinsip dan unsur-unsur koordinasi menurut Sugihartatmo dan Santika (2015; 23).

Mooney (Djarmiko 2015:62) Koordinasi ialah penataan kelompok secara teratur guna mempersatukan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Pendapat lain menjelaskan bahwa koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron serta teratur untuk mempersiapkan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan agar menghasilkan suatu tindakan yang selaras dan harmonis pada target yang telah ditentukan (Terry dalam Sarinah dan Mardalena Tahun 2017:63).

Stoner 1991 dalam (Rifa'I 2016:41) mengemukakan bahwa proses pengorganisasian dibagi menjadi lima

tahapan, yaitu: perincian pekerjaan, pembagian pekerjaan, pemisahan pekerjaan, koordinasi pekerjaan, monitoring dan reorganisasi. Dengan sumber yang sama koordinasi merupakan bagian integral dari proses pengorganisasian. Sebelum lebih jauh mengungkapkan keberadaan koordinasi maka perlu dikemukakan pengertian koordinasi. Reeser, dkk dalam menjelaskan: "*Coordination is the function of assuring that the contributions from subsystem are made as required and that they are linked together into a harmonious whole*". Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa koordinasi ialah suatu fungsi yang menjamin kontribusinya dari satu sub sistem atau bagian dalam organisasi dibuat sebagai syarat yang mana mereka saling terkait bersama kedalam suatu kondisi yang harmonis secara utuh. Sedangkan koordinasi menurut Stoner dalam Djatmiko (2015:62) adalah proses pemanduan tujuan dan kegiatan unit-unit yang terpisah departemen atau biang-bidang fungsional dalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan secara efisien.

Kebutuhan akan adanya koordinasi aktivitas yang dibutuhkan paling rendah pada jenis ketergantungan yang dikelompokkan lebih besar dari

pada jenis ketergantungan timbal balik. Semakin meningkat kebutuhan akan koordinasi maka akan semakin meningkat pula kesukaran untuk melaksanakannya secara efektif. Demikian pula hanya dengan meningkatnya spesialisasi semakin mempertinggi kebutuhan dan koordinasi. Lawrance dan Lorsch (Djatkiko 2015:63) mengemukakan bahwa semakin besar kadar spesialisasi semakin sulit bagi para manajer untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas khusus dari unit-unit yang berbeda, dan cenderung mengembangkan pendapat sendiri tentang tujuan organisasi dan cara pencapaiannya.

Pengertian pembangunan dapat ditinjau dari berbagai segi. Kata pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Seers dalam Utomo 1998;4 disini ada pertimbangan nilai. Dalam sumber yang sama Riggs mengemukakan bahwa ada orientasi nilai yang lebih menguntungkan (*favorable value orientation*).

Pembangunan sering dikaitkan dengan modernisasi dan industrialisasi. Seperti yang dikatakan Goulet dalam Utomo 1998:4, ketiga-tiganya mengangkut proses perubahan. Pembangunan adalah salah satu bentuk

perubahan sosial, modernisasi adalah salah satu bentuk khusus (*special case*) dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah satu segi (*a single facet*) dari pembangunan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan lebih luas sifatnya daripada modernisasi, dan modernisasi lebih luas daripada industrialisasi.

Studi pembangunan menurut Hettne (2001:6) dianggap sebagai studi yang berorientasi pada masalah, bersifat terapan dan lintas ilmu, yang menganalisis perubahan masyarakat dalam konteks dunia, namun tetap memperhatikan kekhasan berbagai masyarakat dalam hal sejarah, ekologi, kebudayaan dan sebagainya. Berdasarkan pandangan yang demikian, wajar apabila tidak mudah memahami apa itu pembangunan, sebagai konsekuensi logis dari cakupan lintas ilmu dan aspek kehidupan manusia.

Konsekuensi lebih lanjut, banyak makna pembangunan dan objek yang dikaji serta ditulis oleh banyak pakar yang begitu beragam. Ada makna pembangunan yang didasarkan pada sudut kepentingan serta ada makna dari sudut pandang orang kecil, penguasa (pejabat), dan pendapat pakar. Ada pula makna pembangunan yang objektif dan ada makna yang subjektif. Ada makna pembangunan menurut pandangan

negara maju dan ada makna pembangunan menurut pandangan negara sedang berkembang. Ada makna pembangunan menurut kajian ekonomi dan ada pula makna pembangunan menurut kajian sosiologis. Realitas demikian dapat ditegaskan bahwa kita bisa menemukan beragam pengertian tentang apa itu pembangunan.

Katz dalam Tjokrowinoto (1993: 8) yang menegaskan bahwa pembangunan adalah pergeseran dari satu kondisi nasional yang satu (*one state of national being*) menuju ke kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik (*more valued*) tetapi apa yang disebut *more valued* (lebih baik/lebih berharga), berbeda dari satu Negara ke negara lain (*culture specific*) atau dari satu periode ke periode lain (*time specific*).

Angin merupakan energi yang terjadi disebabkan adanya perbedaan suhu antara udara dingin dan panas yang mengalir. (Kadir, 1995) Angin adalah udara yang bergerak sehingga terjadi kecepatan, tenaga, dan arah. Penyebab dari pergerakan ini adalah pemanasan bumi oleh radiasi matahari. Pergerakan angin ini memiliki energi kinetik, oleh sebab itu energi angin dapat dikonversi menjadi energi lainnya semacam energi listrik dengan

menggunakan kincir angin atau turbin angin.

Angin seperti fluida yang lain pada umumnya mempunyai profil geseran atau profil kecepatan sewaktu mengalir melewati benda padat, misalnya permukaan bumi. Tepat di permukaan bumi, kecepatan relatif angin terhadap permukaan bumi sama dengan nol. Kemudian kecepatan ini menjadi semakin tinggi sebanding ketinggian dari permukaan bumi. Ada dua jenis profil geseran angin yang biasa digunakan untuk menghitung energi: profil geseran angin eksponensial (*exponential wind shear profile*) dan profil geseran angin kekasaran permukaan (*surface roughness wind shear stress*) (Y. Daryanto, 2007).

Walaupun pemanfaatan energi angin dapat dilakukan dimana saja, daerah yang memiliki potensi energi bayu yang tinggi tetap harus diidentifikasi supaya pemanfaatan energi angin ini lebih kompetitif dibandingkan dengan energi alternatif lain.

Oleh sebab itu studi potensi pemanfaatan energi angin ini sangat cocok dilakukan guna mengidentifikasi daerah-daerah berpotensi. Angin/bayu selama ini dipandang sebagai proses alam biasa yang kurang memiliki nilai

ekonomi sebagai kegiatan produktif masyarakat (Y. Daryanto, 2007).

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian adalah jangka waktu dalam penelitian. Adapun waktu penelitian yang akan ditempuh oleh peneliti yaitu 2 bulan. Dimana penelitian akan dimulai setelah melakukan ujian proposal. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Jeneponto. Dengan mengunjungi Kantor PT. Energi Bayu dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto. Lokasi ini dipilih oleh penulis dikarenakan adanya masalah kerusakan jalan yang disebabkan masuknya PLTB dan sudah berlarut larut tanpa solusi dan adanya saling melempar tanggung jawab.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini berusaha untuk menjawab ini adalah penelitian kualitatif dimana pendekatan ini akan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan fungsi koordinasi antar beberapa instansi dalam proses pembangunan PLTB khususnya di Kabupten Jeneponto. Tipe penelitian yang digunakan yakni tipe deskriptif kualitatif, sebagai cara/upaya mengungkap suatu *problem* ataupun peristiwa yang sifatnya terbatas dengan

menggambarkan dan menganalisis data yang didapatkan.

Informan merupakan seseorang yang akan diwawancarai ialah orang yang faham tentang bagaimana proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), serta yang mengerti tentang kerusakan jalan yang terjadi serta bagaimana koordinasi yang terjadi diantara kedua pihak yang bersangkutan.

Menurut Moleong (2007:3) menjelaskan bahwa analisis kualitatif ialah prosedur penelitian dimana akan menghasilkan data penggambaran berupa kata atau kalimat tertulis maupun pernyataan langsung dari orang-orang dan perilaku/sikap yang diamati.

Menggambarkan kegiatan operasional usaha yang ada terutama terkait dengan proses pendirian PLTB dengan melihat system komunikasi maupun koordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Terkait model analisis yang diterapkan ialah metode analisis deskriptif kualitatif, dimana file/data yang didapat tentang pelaksana PLTB tersebut. Berikut langkah yang dilakukan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota Jeneponto adalah Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km dan berpenduduk sebanyak 330.735 jiwa.

Secara umum kondisi topografi wilayah kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter diatas permukaan air laut (mdpl) yang merupakan lereng pegunungan Gunung Baturape – Gunung Lompo battang. Sedangkan bagian tengah berada di ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl dan pada bagian selatan merupakan pesisirs erta dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 mdpl. Karena berbatasan dengan Laut Flores maka Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup beesar yang terletak di Desa Bungeng.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu bagian yang terdapat dalam struktur pemerintahan Kabupaten Jeneponto tersebut, dibentuk susunan organisasi yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris, sub bagian perencanaan, sub bagian umum dan kepegawaian, sub

bagian aset dan keuangan, bidang bina marga yang meliputi seksi pembangunan jalan dan jembatan, seksi pemeliharaan jalan dan jembatan, bidang cipta karya, seksi pembangunan dan pemeliharaan air bersih, seksi pembangunan dan pemeliharaan lingk. perkotaan & perdesaan. bidang sumber daya air yang terdiri dari seksi pembangunan pengaoran, seksi bina manfaat, operasional dan pemeliharaan pengairan. bidang penataan ruang meliputi seksi penataan ruang bangunan, seksi pengawasan dan pengendalian ruang. bidang bina teknik yang terdiri atas, seksi perencanaan teknis, seksi pengawasan teknis. selanjutnya upt laboratorium dan alat alat berat, upt pengairan serta kelompok jabatan fungsional.

PT. EBJ mengelola pengembangan, desain, pengadaan, manajemen konstruksi, dan operasi semua proyeknya. Pemusatan fungsi pengadaan peralatan dan manajemen konstruksi, bersama dengan pengetahuan lokal yang mendalam, memungkinkan PT. EBJ untuk mengelola risiko dengan lebih baik dan telah memposisikan perusahaan sebagai salah satu operator energi terbarukan yang paling hemat biaya di seluruh wilayah.

Di setiap pasar tempat kami beroperasi, PT. EBJ bertujuan untuk menjadi pengembang lokal terkemuka. PT. EBJ mampu mengembangkan proyek sendiri, mulai dari konsep awal hingga konstruksi. Tim manajemen lokal memberikan keahlian dalam hal originasi, pengembangan, pembebasan lahan, penilaian grid, perizinan, desain sistem dan kelayakan investasi. PT. EBJ menggunakan teknologi paling canggih sepanjang pengembangan proyek dan proses manajemennya untuk memastikan hasil pembangkit energi tertinggi dan layanan O&M yang paling hemat biaya.

PT. EBJ mengembangkan dan mengoperasikan proyek energi terbarukan untuk perusahaan yang menginginkan biaya energi yang dapat diprediksi, risiko yang dikurangi dan skala ekonomi. Jangkauan geografis kami, dikombinasikan dengan pengalaman kami di semua platform energi terbarukan, memungkinkan kami untuk memberikan solusi regional yang efisien yang memenuhi persyaratan klien untuk akses langsung, perjanjian pembelian daya fisik dan virtual (PPA), serta sertifikat energi hijau.

Dengan total 20 turbin angin, masing-masing dengan bilah 80 ton sepanjang 63 meter dan lebar lima meter, Proyek Angin Tolo 72-megawatt

adalah pemandangan yang benar-benar mengesankan untuk dilihat. Terletak di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia, ia mampu memasok hingga 160.000 rumah tangga dengan energi terbarukan per tahun dan mengurangi sekitar 220.000 ton emisi gas rumah kaca. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tolo 1 Jeneponto, dimana mengembangkan sebuah pembangkit listrik tenaga angin yang terletak di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pembangkit listrik ini memiliki 20 Wind Turbine Generator (WTG) dengan tinggi 133 meter dan panjang baling-baling 63 meter. Pembangkit listrik ini diperkirakan dapat menghasilkan listrik sebanyak 198,6 GW setiap tahunnya dengan kecepatan angin 6 m/s. Pembangkit listrik ini juga diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 160.600 ton karbon dioksida setiap tahunnya. Proyek ini sendiri dimulai pada tanggal 2 Juli 2018 dan menelan biaya sebesar US\$160,7 juta. Sebelum itu, pemerintah sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) untuk pembangkit listrik ini pada tanggal 14 November 2016 dengan masa kontrak 30 tahun. Harga jual yang disepakati adalah 11,85 sen dolar per kWh.

Prinsip kerja PLTB menggunakan kincir angin untuk mengkonversi energi kinetik dari angin menjadi energi listrik. Energi kinetik angin akan masuk ke area turbin sehingga memutar kincir angin yang kemudian menggerakkan generator untuk membangkitkan listrik. Daya turbin angin dipengaruhi oleh volume, densitas, dan kecepatan angin. Berikut ini merupakan skema kincir angin. Angin akan menggerakkan baling-baling yang berfungsi menangkap energi kinetik dari angin lalu mengkonversinya menjadi energi mekanik putar yang terhubung dengan rotor. Jumlah blade umumnya 3 atau lebih. Unit gear box merupakan transmisi pada turbin angin yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari rotor menuju generator dengan mempercepat putaran. Generator merupakan unit utama dalam sistem kincir angin yang berfungsi untuk mengkonversi energi mekanik putaran rotor menjadi energi listrik. Terdapat unit pengendali berupa controller yang berfungsi mengendalikan arah dari poros turbin, anemometer untuk mengukur kecepatan angin, yaw drive berfungsi untuk mengatur posisi komponen turbin angin optimal terhadap arah angin, yaw motor yang berfungsi menggerakkan yaw drive.

Pelaksanaan fungsi koordinasi perlu dilakukan agar suatu pekerjaan lebih mudah dan dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi. Untuk melihat bagaimana fungsi koordinasi ini dilaksanakan, dapat dilihat dari beberapa indikator/aspek yakni, upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik, selain itu berbicara pula tentang manage anggaran untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran, serta perlu adanya kesamaan pendekatan / pandangan dalam melihat masalah yang terjadi dan perlu adanya kesatuan tindakan atau pelaksanaan.

Pencegahan Konflik dan Kontradiksi

Pencegahan konflik dan kontradiksi pada dasarnya adalah tentang sarana mengakhiri bagaimana mengidentifikasi situasi yang mungkin menjadi berbahaya kekerasan sangat merusak dan bagaimana untuk menghentikan mereka menjadi demikian. Ini bukan tentang mencegah konflik normal sehari-hari melainkan usaha menghindari kekerasan dan kerusakan secara turun-temurun.

Sesuai dengan penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa Dinas PUPR mengharapkan pertanggungjawaban dari pihak PLTB

sebagai pelaksana pembangunan tersebut. Selain itu Dinas PUPR juga ingin adanya ruang diskusi untuk membahas permasalahan yang terjadi agar segera mengambil tindakan perbaikan jalan yang telah dirusak akibat pembangunan PLTB tersebut. Pihak PUPR telah melakukan tugasnya terkait pembangunan jalan, namun jalan ini baru sekitar 1 tahun dinikmati oleh masyarakat dan sekarang telah rusak kembali.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi penulis yang menemukan bahwa permasalahan jalan yang rusak diakibatkan oleh mobil truk pengangkut material basah pada pembangunan PLTB, dan pihak Manager PLTB tidak merespon komentar dari Kepala Dinas PUPR sehingga hal ini menimbulkan konflik serta kontradiksi antara Dinas PUPR dan PLTB.

Sesuai dengan penjelasan informan di atas, dapat diketahui bahwa pihak PLTB ingin melakukan perbaikan jalan, namun dalam hal ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh PLTB saja, tetapi juga melibatkan Dinas PUPR. PLTB ingin perbaikan jalan dilakukan bersama dan masing-masing pihak menanggung sebanyak 50% baik dalam hal anggaran maupun pembagian kerjanya.

Hal ini tidak sesuai dengan observasi penulis yang menemukan bahwa dinas PUPR sering menagajak untuk berkoordinasi terkait permasalahan yang terjadi, namun PT. Energi Bayu tidak pernah merespon panggilan tersebut, sehingga sampai saat ini belum ada tindakan perbaikan disebabkan karena tidak adanya respon serta sikap yang tidak terbuka oleh pihak PLTB. Dengan demikian koordinasi tidak akan dapat berjalan sesuai fungsinya dan akan menimbulkan konflik lanjutan kedepannya.

Berdasarkan uraian penjelasan dari kedua informan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pencegahan konflik lanjutan yang terjadi antara dinas PUPR dan PLTB tidak menemukan titik terang dalam penyelesaiannya. Dikarenakan koordinasi yang diberikan oleh dinas PUPR tidak direspon oleh Manager Utama PLTB, masing-masing berpendirian pada ego di antara kedua pihak, akibatnya ruas jalan yang rusak akibat mobil pengangkut material basah itu sampai sekarang belum ada perbaikan yang dilakukan oleh PLTB maupun Dinas PUPR, karena menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto yang harus bertanggung jawab pada proses perbaikan jalan tersebut adalah Pihak PLTB. Namun

yang terjadi pihak PLTB sama sekali tidak merespon teguran dari Dinas PUPR. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi dibutuhkan hubungan yang baik, komunikasi yang baik dan yang terlebih penting yaitu adanya timbal balik yang baik diantara kedua pihak serta perlu adanya kepedulian bersama terhadap suatu masalah yang terjadi.

Pencegahan Pemborosan

Dalam hal pencegahan pemborosan masing-masing kedua instansi tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam proses pembangunan PLTB dalam hal pencegahan pemborosan Dinas PUPR berupaya melakukan hal tersebut dengan memberikan sepenuhnya tanggung jawab kepada PLTB dalam hal memperbaiki jalan yang rusak.

Sesuai dengan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa Dinas PUPR telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada, namun jalan yang baru saja diselesaikan oleh Dinas PUPR telah rusak disebabkan pembangunan PLTB, sehingga apabila jalan ini seharusnya diperbaiki oleh PLTB itu sendiri. Apabila jalan tersebut diperbaiki

kembali oleh Dinas PUPR akan mengakibatkan pemborosan.

Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis yang menemukan bahwa tugas yang dijalankan oleh PUPR sudah sesuai selanjutnya bagaimana pihak PLTB dapat bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang rusak oleh pembangunan yang dilakukannya.

Sesuai dengan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa PT. Energi Bayu menganggap rusaknya jalan karena adanya ketidak sengajaan dari Pihak perusahaan dan apabila PLTB sendiri yang mengambil alih perbaikan jalan akan terasa berat serta akan menyebabkan pemborosan anggaran. Selain itu PLTB telah memenuhi SOP perusahaan dengan melakukan pelebaran sehingga tidak perlu lagi melakukan perbaikan jalan.

Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis yang menemukan bahwa PT. Energi Bayu itu sendiri telah berpegang pada SOP perusahaan dengan mengadakan pelebaran jalan sehingga akan menyebabkan pemborosan apabila melakukan perbaikan jalan.

Berdasarkan uraian penjelasan dari kedua informan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pencegahan pemborosan yang terjadi

antara kedua pihak masing-masing berpendirian pada SOP yang mengaturnya, namun ketika pihak PLTB tidak mengindahkan teguran dari Dinas PUPR maka jalan yang rusak tersebut tidak akan perbah bagus lagi, artinya kedua instansi ini tidak ingin sama-sama rugi dan ketika permasalahan tersebut tidak selesai yang rugi adalah masyarakat.

Pencegahan Terjadinya Perbedaan Pendekatan dan Pelaksanaan

Dalam hal pencapaian tujuan ataupun upaya penyelesaian masalah harus satu dalam pendekatan dan tata pelaksanaan agar bisa sejalan dalam menjalin kerjasama. Dengan pendekatan dan tata pelaksanaan tersebut akan memudahkan dalam pencapaian tujuan, pelaksanaan tugas dan sebagainya.

Sesuai dengan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa Dinas PUPR memiliki metode, pendekatan dan tata pelaksanaan tersendiri, dimana pihak DPUPR telah berjalan sesuai dengan pendekatan dan tata pelaksanaan tersebut. Telah jelas bahwa salah satu tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang di salah satu bagiannya yaitu pelaksanaa pembangunan infrastruktur jalan, namun dalam hal ini DPUPR

mengembalikan masalah kerusakan jalan tersebut kepada PLTB karena kerusakan jalan tersebut terjadi selama masuknya pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu.

Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis yang menemukan bahwa DPUPR telah melaksanakan tugas nya berdasarkan pendekatan dan tata pelaksanaannya. Mengingat bahwa jalan itu baru kurang lebih 1 tahun dinikmati oleh masyarakat setempat. Harusnya pihak DPUPR dan PLTB segera berkoordinasi tanpa mengedepankan ego masing-masing.

Sesuai dengan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa PT. EBJ sendiri juga mengatakan hal yang sama bahwa perusahaannya juga memiliki pendekatan yang berbeda begitupun persoalan pelaksanaan. Namun telah jelas orientasi PT. EBJ yaitu pemabngunan pembangkit listrik bukan pembangunan jalan. Sehingga memberikan urusan pekerjaan jalan oleh yang berwenang dirana tersebut.

Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis yang menemukan bahwa PT. EBJ memang juga menerapkan pendekatan dan pelaksanaan yang berbeda, namun dalam kerusakan jalan yang disebabkan masuknya PLTB ini seharusnya PT. EBJ juga tidak boleh menutup mata dan

telinga melihat kerusakan tersebut, karena tidak bisa dipungkiri hal tersebut memang terjadi karen masuknya PLTB di Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan uraian penjelasan dari kedua informan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa DPUPR dan PT. EBJ mempunyai perbedaan pendekatan dan pelaksanaan sehingga memperngaruhi gagalnya koordinasi. Harusnya dari awal kedua pihak saling terbuka sehingga bisa menyatukan persepsi dan bisa saling *sharing* pendapat dan menemukan solusi terbaik atas masalah yang terjadi.

Pencegahan Terjadinya Pelaksanaan

Dalam koordinasi perlu adanya keselarasan dalam pelaksanaan serta pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam koordinasi antar instansi/perusahaan perlu adanya kejelasan dalam melakukan kerjasama ataupun dala memecahkan suatu masalah.

Sesuai dengan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa PT. EBJ sendiri melaksanakan apa yang jadi tugasnya dan terfokus pada pembangunan PLTB dan menyerahkan semua masalah jalan itu kepada pemerintah. Selain itu EBJ tidak pernah merasa menutup diri jika memang itu bukan urusan mereka.

Hal ini tidak sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis yang menemukan bahwa PT. EBJ tidak ingin melakukan koordinasi dan selalu mengedepankan ego dan pendapatnya sepihak dan tidak pernah peduli dengan masalah jalan, sehingga tidak bisa terjadi kesatuan tindakan maupun pelaksanaan karna tidak adanya pertemuan dan pembagian kerja antara EBJ dan DPUPR.

Berdasarkan uraian penjelasan dari kedua informan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pihak DPUPR ingin membuka ruang untuk berkoordinasi dan membagi tugas, namun PT. EBJ tidak menginginkan hal demikian karena menganggap hal tersebut bukan ruangny atau bukan urusannya. Sehingga wajar saja ketika koordinasi tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada keselerasan atau kesatuan niat dan kemauan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan atau dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan fungsi koordinasi dalam pembangunan PLTB yang dimana dalam pembangunannya mengakibatkan kerusakan jalan tersebut sampai saat ini tidak mendapatkan titik

terang dalam upaya perbaikannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasinya tidak diterapkan/dilaksanakan dengan baik, 2) Faktor yang mempengaruhi koordinasi ada beberapa item diantaranya hubungan kerja, kedisiplinan dan kesatuan tindakan. Dalam beberapa faktor tersebut juga tidak diterapkan dengan baik karna adanya salah satu pihak yang yang menutup mata dan telinga dan tidak merespon dengan baik, sehingga faktor faktor koordinasi tidak diterapkan dengan baik.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Diharapkan kepada PT. Energi Bayu Kabupaten Jeneponto (EBJ) segeramengindahkan panggilan dari Dinas PUPR untuk berkoordinasi mengenai jalan yang dirusak oleh masuknya pembngunan PLTB, 2) Diharapkan kepada DPUPR serta PT. EBJ memapu mengawal ataupun tidak mengutamakan egonya masing-masing agar bisa mengatasi kecanggungan yang ada serta segera menemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah jalan dengan mengesampingkan persoalan untung rugi masing-masing pihak. sehingga masyarakat dapat kembali merasakan fasilitas yang ada, 3) Diharapkan agar DPUPR serta PT. EBJ

dapat menyatukan persepsi sehingga terwujud kesatuan tindakan sehingga hubungan kerja sama dapat terbangun diantara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djatmiko, Yayat Hayati. 2015. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Handyaningrat, Soewarno. 1986. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Herispon. 2018. *Pengantar Manajemen (Introduction Management)*. Pekanbaru: STIE Riau
- Mardalena dan Sarinah. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish
- Moleong, Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- Rosdakarya Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta
- Patton, Michael Quinn. 1987. *Qualitative Education Methods*. California: Sage Publication
- Rifa'i, Muhammad dan Candra Wijaya. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishin.
- Sentika dan Sugihartatmo. 2015. *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung